KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME DI BIDANG KESUSILAAN

Hardianto Djanggih

Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis teknologi informasi bagi masyarakat memiliki dampak positif sekaligus memiliki dampak negatif. Dampak negatif teknologi informasi adalah munculnya kejahatan bersarakan teknologi informasi, yaitu cyber crime. Cyber crime yang memiliki dampak negatif bagi proses pendidikan moral, nilai, budi pekerti, watak dan pendidikan agama adalah cyber crime di bidang kesusilaan yaitu cyber sex dan cyber (child) pornography. Sebenarnya adalah cyber sex dan cyber (child) pornography memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pengguna teknologi. Oleh karena itu cyber sex dan cyber (child) pornography harus ditanggulangi dengan cara rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa perangkat hukum saat ini memiliki kelemahan yuridis, yakni KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 2011, yaitu terbatasnya berlakunya hukum pidana hanya di wilayah Indonesia sebagai konsekuensi asas teritorial. Undang-undang khusus juga tidak terlepas dari kelemahan seperti tidak adanya ketentuan pemidanaan yang pada akhirnya mempersulit dan menghambat penegakan hukum terhadap cyber crime bidang kesusilaan.

Kata kunci : kebijakan hukum pidana, cyber crime, teknologi informasi, kesusilaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, seiring pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Disamping itu karena bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, salah satu bagian dari dimensi kehidupan sosial saat ini yang perlu upaya kebijakan hukum pidana yakni dampak teknologi informasi yang sangat berkembang dengan pesat menyebabkan banyak perubahan pada segi kehidupan sosial masyarakat, baik ekonomi, sosial politik. Sistem komunikasi dan interaksi, pendidikan, termasuk juga hukum. Teknologi informasi "internet" pada awalnya dikembangkan semata-mata untuk memudahkan manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya.

Komunitas masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya kian hari semakin meningkat. Kecenderungan masyarakat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace* merupakan bukti bahwa *internet* telah membawa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Internet merupakan hasil revolusi teknologi, yang mengkolaborasikan teknologi informasi dan komputer secara sinergis. *Internet* dalam perkembangannya telah menyebabkan perubahan secara cepat terhadap struktur masyarakat dan dari agraris ke industri, industri ke informasi. Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *on line* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini,

penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut.

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

Substansi/materi yang diatur dalam UU ITE ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum internasional serta azas *Cybercrime*. Undang-undang tersebut mengkaji *cyber case* dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam *cyberspace* seperti perjudian, pornografi, pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media *internet* serta akses komputer tanpa izin oleh pihak lain (*cracking*) dan menjadikan seolah dokumen otentik (*phising*).

Kejahatan internet bermula dari kejahatan komputer karena internet adalah peningkatan kualitas kecanggihan teknologi komputer. Berbagai hasil pengamatan baik dari media massa (cetak dan elektronik), penelitian lapangan, *cyber crime* memiliki dampak yang sangat serius terhadap perkembangan sosial masyarakat itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi objek kajian tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana melalui pendekatan KUHP untuk menanggulangi tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana melalui pendekatan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menanggulangi tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan?

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan KUHP dalam Penanggulangan Cyber Crime di Bidang Kesusilaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum nasional adalah sumber hukum sekaligus payung hukum untuk menindak berbagai macam tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan masalah *cyber crime*, KUHP nasional pengaturannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengaturan secara umum/tidak langsung dan pengaturan secara khusus/ langsung. Pengaturan secara langsung artinya mengatur secara eksplisit tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan *cyber crime*.

Pasal KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber crime* secara umum meliputi:

- 1) Pasal yang mengatur masalah Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112, 113, 114, 322, 323 dan Pasal 431).
- 2) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Memasuki atau Melintasi Wilayah Orang Lain Tanpa Hak (Pasal 167, 551).
- 3) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pemalsuan (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276).
- 4) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pencurian (Pasal 362, 363, 364, 365 dan Pasal 367).
- 5) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penggelapan (Pasal 372, 373, 374, 375 dan Pasal 376).
- 6) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penipuan (Pasal 378, 379 dan Pasal 395).
- 7) Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penghancuran atau Perusakan Barang (Pasal 406, 407 sampai dengan Pasal 412).

Pasal-pasal KUHP tersebut diatas, dapat diterapkan untuk kejahatan bersasaran komputer/internet pada umumnya, sedangkan untuk pasal yang khusus dapat diterapkan terhadap *cyber crime* di bidang kesusilaan (*Cyber sex, cyber (child) pornography*), meliputi:

- 1) Pasal 282 dan Pasal 283.

a. Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 282 ayat (1) jika dianalisis rumusannya, maka akan ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa, yang mengacu pada pelaku, artinya pelakunya bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi.
2. Tindakan yang meliputi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.
3. Masalah tempat, yaitu di muka umum.
4. Bentuknya meliputi tulisan, gambar atau benda.
5. Sifat barangnya isinya melanggar kesusilaan.
6. Tindakan membikin tulisan, gambar atau benda dengan tujuan disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.
7. Tindakan memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan, atau secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat.
8. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Uraian-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1) ini relevan untuk menjerat pelaku *cyber crime* di bidang kesusilaan. Para pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan apalagi bersaranakan tekno-informasi *internet* jelas pelakunya bisa orang-perorangan tetapi juga bisa korporasi. Pelaku terakhir ini tampaknya yang paling banyak mendominasi produksi situs porno di *internet*.

Pasal 282 dalam redaksinya cukup bersifat antisipatif dan prediktif, dengan menerapkan sistem sanksi alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara nantinya dikenakan kepada pelaku *cyber crime* di bidang kesusilaan untuk orang-perorangan sedangkan pidana denda khusus untuk korporasi.

Unsur berikutnya adalah bentuk tindakannya, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan. Tindakan itu dilakukan di muka umum. Bentuknya bisa berupa tulisan, gambar atau benda.

Internet pada dasarnya adalah media komunikasi, media informasi masyarakat dalam tingkat yang lebih canggih. *Internet* dalam menjalankan fungsinya adalah dengan menyiarkan, mempertunjukkan kepada siapa saja yang mengaksesnya. Selain itu tampilan *internet* bisa berupa gambar, tulisan, gambar dan suara, film (audio visual). Jangkauan siarannya berskala nasional dan internasional. Jika yang dimuat, disiarkan adalah gambar, tulisan atau bahkan film yang substansinya bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, maka penyedia, pembuat situs, *web* di *internet* dapat dijerat dengan pasal ini.

Tindakan memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan dalam konteks kecangihan teknologi dewasa ini, tidak perlu dilakukan secara fisik dengan mengirim atau mendatangkan atau memesan kepada penyedia. Tindakan tersebut dengan fasilitas *internet* cukup

menyediakan, memasukkan dalam situs *web*. Situs *web* ini kemudian dengan sarana *internet* dan komunikasi satelit sudah bisa/mudah dikirim, diakses, dilihat siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Pasal 282 ayat 3 ditegaskan jika tindakan melakukan *cyber crime* di bidang kesusilaan sebagai profesi, mata pencaharian atau kebiasaan maka ada pemberatan sanksi pidana menjadi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Dalam kenyataannya, *cyber crime* di bidang kesusilaan dikembangkan, diproduksi sebagai ajang profesi, mata pencaharian bahkan bisnis dengan skala internasional. Pelaku *cyber crime* di bidang kesusilaan ini adalah perusahaan-perusahaan besar dengan modal jutaan dolar, dan hasilnya/labanya juga jutaan dolar per tahunnya.

b. Pasal 283

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*

Pasal 283 menegaskan beberapa unsur tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku yang dirumuskan dengan bahasa barang siapa, yang artinya bisa orang perorangan maupun badan hukum/korporasi.
2. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
3. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
4. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
5. Sasarannya adalah seorang yang belum cukup umur yaitu belum mencapai umur 17 tahun.
6. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. Rumusan ancaman pidana ini bersifat alternatif sebagai konsekuensi dari rumusan kata barang siapa. Rumusan barang siapa

mempunyai arti orang atau badan hukum/korporasi. Untuk pelaku orang perorangan bisa dikenakan sanksi pidana penjara atau denda, sedangkan badan hukum/korporasi hanya denda saja karena badan hukum tidak mungkin dikenakan sanksi pidana penjara.

Pasal 283 ayat (2) hanya memuat satu tindak pidana saja yaitu membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, dengan sasarannya anak dibawah umur yaitu belum mencapai umur 17 tahun.

Pasal 283 ini memiliki cakupan tindak pidana *cyber crime* dibidang kesusilaan, akan tetapi medianya tidak hanya terbatas pada internet dengan sarana komputer. Kata *"memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan"* bisa bermakna semua alat, barang yang mampu menampung, menyimpan *tulisan, gambar atau benda* yang melanggar kesusilaan. Dengan kata lain barang/benda seperti *USB, Disket, Handphone, Communicator* yang diduga didalamnya menyimpan *tulisan, gambar atau benda* yang melanggar kesusilaan maka dapat dipidana dengan dasar Pasal 283 ayat (1).

c. Pasal 289

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pasal 289 ini jika dianalisa rumusannya mengatur masalah kejahatan kesusilaan dengan unsur pidana sebagai berikut:

1. Pelaku dirumuskan dengan kata barang siapa. Barang siapa dalam Pasal 289 tampaknya berbeda arti dengan rumusan barang siapa Pasal 282 dan Pasal 283. Dalam ketentuan Pasal 289, rumusan barang siapa hanya khusus pelakunya orang perorangan, sedangkan Pasal 282 dan 283 bisa orang, bisa badan hukum/korporasi. Pemikiran ini didasarkan pada rumusan sanksi pidana yang bersifat tunggal yaitu pidana penjara saja. Pidana penjara hanya tepat dikenakan pada orang bukan badan hukum.
2. Perbuatannya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam rumusan ini orang yang dikenakan pidana statusnya ada dua kemungkinan. Yang *pertama* orang ini melakukan sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, *kedua* orang ini bukan pelaku tetapi saksi yang melihat kejadian perbuatan cabul tetapi dia membiarkannya, mengabaikannya sehingga perbuatan cabul terjadi.

d. Pasal 532 ayat 2

"Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah:..... barang siapa dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan".

Pasal 532 ayat (2) ini mengandung unsur pidana meliputi perbuatan pidato, tempat dimuka umum dan sifatnya melanggar kesusilaan.

Pidato pada hakikatnya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks pidato tradisional orang langsung bertatap muka hanya berbekal pengeras suara. Dalam dunia serba canggih ini, *internet* sebagai sarana penyampai informasi masyarakat. Orang, badan hukum jika ingin menyampaikan informasi cukup menaruhnya dalam situs, *web*. Dalam situs, *web* ini masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai keinginan. Jika secara substansi informasi yang disampaikan kepada publik mengandung unsur melanggar kesusilaan, maka dapat dipidana.

e. Pasal 533

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

- (1) Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- (2) Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- (3) Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;*
- (4) Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, kepada seorang yang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun;*
- (5) Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, dimuka seorang yang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun.*

Pasal 533 ayat (1) mengandung unsur- unsur pidana sebagai berikut:

1. Pelaku yang dirumuskan dengan kalimat barang siapa. Artinya pelaku dalam pasal ini bisa orang-perorangan maupun badan hukum.
2. Perbuatan dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda.
3. Tempat untuk lalu lintas umum.
4. Akibat perbuatan mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.
5. Sanksi pidana bersifat alternatif, yaitu antara pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah.

Pasal 533 ayat (2) mengandung unsur pidana yaitu perbuatan dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan, tempatnya untuk lalu lintas umum dan akibat perbuatan itu dapat membangkitkan nafsu birahi para pemuda.

Pasal 533 ayat (3) mengandung unsur pidana sebagai berikut,yaitu:

1. Pelaku dirumuskan dengan kalimat barang siapa yang artinya bisa orang-perorangan maupun badan hukum.
2. Perbuatan dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran.
3. Akibatnya mampu membangkitkan birahi.
4. Sasarannya adalah para pemuda.

Pasal 533 ayat (4) mengandung unsur pidana sebagai berikut,yaitu:

1. Barang siapa yang artinya bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi .
2. Perbuatannya adalah menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian. Gambar yang demikian artinya gambar yang bertentangan dengan kesusilaan. Istilah menawarkan,memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan mengandung makna bahwa gambar/tersebut bisa berupa majalah, foto-foto, gambar audio visual, film yang tersimpan dalam *USB, disket*, dalam komputer, *laptop,handphone* maupun *communicator*.
3. Sasarannya adalah seorang yang belum cukup umur yaitu orang yang belum mencapai umur tujuh belas tahun.

Pasal 533 ayat (5) hanya mengandung unsur pidana sebagai berikut, yaitu memperdengarkan isi tulisan yang bertentang dengan kesusilaan, dimuka seorang yang belum cukup umur yaitu orang yang belum mencapai umur tujuh belas tahun.

Ada beberapa catatan terhadap pasal KUHP yang dapat diterapkan terhadap *cyber crime* dibidang kesusilaan (*cyber pornography*), yaitu:

1. Dalam KUHP khususnya Pasal 282, 283, 289, 532, ayat (2) dan Pasal 533 hanya mengenal istilah melanggar kesusilaan. Dalam konteks perkembangan masyarakat, istilah kesusilaan tidak begitu populer, sebaliknya masyarakat menggunakan istilah pornografi dan pornoaksi. Perbuatan pornografi, pornoaksi bisa atau tidak dimasukkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan juga masih terjadi pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena KUHP sendiri tidak pernah memberikan definisi tegas terhadap perbuatan melanggar kesusilaan.

Secara teoretis tidak adanya definisi kesusilaan dalam KUHP sebenarnya menimbulkan dua dampak yaitu positif dan negatif.

Dampak negatifnya adalah menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya definisi tegas tentang kesusilaan ataupun pornografi. Dampak yuridis dalam praktek, KUHP telah “menyerahkan” tafsir pelanggaran kesusilaan kepada majelis hakim. Penyerahan penafsiran pornografi pada hakim di satu sisi dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Abdul Qodir (<http://www.detiknet>. 2011) telah membuktikan dalam penelitiannya bahwa

yurisprudensi yang ada telah menunjukkan bahwa pertimbangan dari putusan-putusan hakim atas kasus-kasus delik pornografi tidak memberikan suatu gambaran tentang pemahaman hakim-hakim Indonesia mengenai masalah pornografi.

Dampak positifnya adalah:

- a. Dengan tidak adanya definisi kesusilaan, pornografi, porno aksi dalam KUHP, artinya KUHP telah memberikan ruang pada perubahan zaman dalam menafsirkan sebuah informasi dapat dikatakan pornografi atau tidak.
- b. Tidak adanya rumusan baku tentang kesusilaan, pornografi, pornoaksi dalam KUHP, bukan berarti sistem hukum nasional tidak mengenal delik pornografi. Delik pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), yaitu yang khusus berkaitan dengan seksualitas.

Wirjono Prodjodikoro (<http://www.detiknet.2011:2>) menegaskan bahwa rumusan pasal-pasal dalam KUHP tidak menyebut kata “pornografi” secara langsung (*letterlijk*). Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, para ahli ilmu hukum menggunakan istilah delik pornografi ini untuk membedakannya dengan kejahatan dan/atau pelanggaran kesopanan yang lain. Wirjono sendiri menyebut kejahatan dan pelanggaran ini sebagai “Tindak Pidana mengenai Pornografi”.

2. Dalam KUHP Pasal 282, 283, 532 dan 533 hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana *Cyber Crime* di bidang kesusilaan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia. Disisi lain *Cyber Crime* dibidang kesusilaan adalah kejahatan bersasaran teknologi canggih. Sifatnya cepat dan tanpa batas/transnasional. Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di negara asing, namun akibatnya dirasakan oleh negara/warga negara Indonesia, dengan KUHP ini tidak bisa dipidana. Sebab utamanya adalah asas teritorialitas, yaitu hukum pidana hanya berlaku di wilayah Indonesia, dan terhadap kejahatan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia.

Leo Batubara (2011: 1) mengklasifikasikan pornografi dalam dua kategori, yaitu:

- a. *Hardcore pornography* atau pornografi berkategori *obscene*, yaitu berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks: (1) dengan pasangan sejenis, (2) dengan anak-anak (*pedophilia*), (3) dengan kekerasan, (4) dengan orang-orang yang telah mati, dan (5) dengan hewan. Menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan hal-hal sebagaimana dikemukakan adalah perbuatan kriminal dan diancam pidana penjara dengan hukuman berat dan denda besar.
- b. *Softcore pornography* yakni aktivitas pornografi diluar hal-hal tersebut diatas, yang meliputi : (1) Membuat tulisan, suara, film/tayangan, (2) menjadi pelaku atau model, dan (3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar *hardcore pornography* untuk orang dewasa bukanlah kejahatan, seperti tarian eksotis atau bergoyang erotis, berciuman bibir, atau bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa. Delik pornografi khususnya *cyber crime* di bidang

kesusilaan termasuk *Softcore pornography*. *Cyber crime* bidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu: *Pertama*, situs yang menampilkan foto atau adegan porno secara gratis. *Kedua*, situs porno yang hanya bisa dilihat dengan mengeluarkan sejumlah uang atau berlangganan terlebih dulu. *Ketiga*, berupa *mailinglist* yang memungkinkan pengakses internet saling menukar foto porno atau bahkan lebih dari itu. (<http://www.hikmah.2011>)

Permasalahan barang bukti dalam tindak pidana *cyber* ini, dapat berpedoman pada Pasal 36 KUHAP. Pasal 36 KUHAP memberikan rambu-rambu terkait dengan barang apa saja yang dapat dijadikan barang bukti dalam tindak pidana *cyber crime* secara umum maupun *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*). Barang bukti tersebut adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka / terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan diatas, dalam kasus tindak pidana *cyber crime* pada umumnya ataupun *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*), benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah :

1. Seluruh perangkat komputer beserta *accessories*-nya (*modem, printer*) atau *hardware*.
2. *Software* yang berhubungan (*disket, manual, catalog*).
3. *Data output* (*Print out, catatan lalu – lintas giral*).
4. Khususnya untuk kejahatan komputer dalam kegiatan perbankan maka dokumen–dokumen yang berhubungan dengan kegiatan operasional perbankan tersebut (*aplikasi transfer, Voucher, nota debet/kredit dan lain – lain*).
5. Khusus untuk *cyber crime* di bidang kesusilaan, maka data dalam komputer, *laptop, disket, USB, handphone* maupun *communicator* yang berupa tulisan, gambar, suara, film (audio visual) adalah bukti akuratnya.

B. Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan

Negara Indonesia telah membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum teknologi informasi (*law of information technology*) setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau mayantara ini dianggap oleh pemerintah perlu untuk memberikan keamanan dan

kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Kritik masyarakat baik dari akademisi, aparat penegak hukum, para *bloggers* terutama *hackers* pada saat disahkannya UU ITE adalah hal yang wajar di era demokratisasi seperti saat ini. Karena dalam merumuskan peraturan hukum dewasa ini harus mempertimbangkan secara komprehensif beragam dimensi persoalan. Di sini orang akan mempersoalkan hak-hak warga seperti kebebasan berekspresi, kebebasan media, dan masalah-masalah HAM seperti : persoalan privasi, hak untuk memperoleh informasi, dan sebagainya yang saat ini sangat diperhatikan dalam legislasi positif nasional. Di sinilah relevansi persoalan hak dan kewajiban menjadi penting.

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Barda Nawawi Arief, 1999: 5). Oleh karena itu tujuan pembuatan UU ITE tidak terlepas dari tujuan politik kriminal, yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*).

Evaluasi terhadap kebijakan di dunia maya tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, evaluasi atau kajian ulang ini perlu dilakukan, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan (*legislative policy*) dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan kebijakan pemberantasan/penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan. (Heru Sutadi, 2011: 4).

Landasan filosofi lahirnya Undang-Undang pemanfaatan informasi teknologi informasi, adalah untuk mensiasati dan mengantisipasi globalisasi yang sekarang sedang bergulir kencang. Era globalisasi adalah era dimana pemanfaatan teknologi informasi "internet" sudah melekat bahkan menjadi gaya hidup masyarakat global. Dalam aspek hukum, era globalisasi dengan *icon* pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang telah melahirkan tingkah laku baru yang sebelumnya sama sekali tidak terantisipasi baik yang bersifat positif maupun negatif.

Proses pemanfaatan teknologi agar tetap bisa terus berlangsung sesuai dengan koridor yang berlaku, maka diperlukan perangkat hukum untuk memagari perilaku yang mungkin timbul sebagai akibat pemanfaatan teknologi informasi secara salah.

Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan tanpa mengesampingkan persatuan dan kesatuan nasional dan penegakan hukum secara adil, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dihindari melalui penerapan keseragaman asas dan peraturan perundang-undangan.

1. Sistem Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merumuskan tindak pidana pada Bab XIV mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

1. Pasal 45

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

2. Pasal 46

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.*

3. Pasal 47

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

4. Pasal 48

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

5. Pasal 59

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

6. Pasal 50

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Pasal 51

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

8. Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Berdasarkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, dapat disimpulkan menyimpulkan dalam Undang-Undang ITE ini menyangkut delik-delik sebagai berikut:

1. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. (Pasal 27).
2. (1) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, (2) menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (Pasal 28).
3. mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. (Pasal 29).

4. (1) perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. (Pasal 30)
5. (1) perbuatan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (2) perbuatan melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (Pasal 31)
6. (1) perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (2) perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (Pasal 32)
7. perbuatan melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. (Pasal 33).
8. perbuatan memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
9. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Mengenai unsur sifat '*melawan hukum*', dalam UU ITE tersebut disebutkan secara tegas, unsur '*sifat melawan hukum* tersebut dapat dilihat pada perumusan "*....setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam pasal...*" seperti dirumuskan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan disebutkannya secara tegas unsur '*sifat melawan hukum*'

terlihat ada kesamaan ide dasar antara UU ITE dengan KUHP yang masih menyebutkan unsur sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Melihat berbagai ketentuan yang telah dikriminalisasikan dalam UU ITE tersebut, nampak adanya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan penggunaan di bidang teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbentuk tindak pidana *Cyber Sex dan Cyber (Child) Pornography*.

2. Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 maka dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE adalah meliputi *individu/orang per orang* dan *korporasi*. Ini terbukti dari ketentuan pasal-pasal tersebut yang diawali dengan kata "*Setiap orang ...*" dan "*korporasi...*".

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana. Pelaku yang dapat dipidana adalah orang dan korporasi, yang dijelaskan dalam Pasal 1 sub 21 dan dalam ketentuan pidana UU ITE tersebut.

UU ITE mengatur secara lanjut dan terperinci tentang ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena UU ITE tersebut membedakan pertanggungjawaban pidana terhadap individu dan korporasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 UU ITE.

UU ITE merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Kalimat ini mengandung makna yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang-perorangan atau badan hukum/korporasi. Terkait dengan STP badan hukum/korporasi, UU ITE tidak menetapkan pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar oleh korporasi. Proses PJP antara STP orang-perorangan dan badan hukum tidak ada perbedaan secara tegas. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana siapa yang patut dipertanggungjawabkan juga tidak ada ketentuan tegas.

2. Unsur kesengajaan disebut secara tegas, serta sifat melawan hukum juga demikian.

Dengan kata lain UU ITE tampaknya masih berorientasi pada KUHP yang saat ini berlaku. Dalam KUHP konsep pencantuman unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum tidak secara eksplisit disebut dalam pasal. RUU Konsep memiliki suatu pandangan bahwa suatu tindak pidana sudah sepatutnya dianggap selalu melawan hukum.

3. Sanksi pidana dirumuskan secara maksimal dengan sistem kumulatif. Sistem ini adalah sama dengan sistem yang dipakai dalam KUHP yang saat ini berlaku. Dalam masalah sanksi pidana tampaknya UU ITE tidak banyak membuat ketentuan khusus yang menyimpang dari aturan umum KUHP, sehingga walaupun dalam RUU PTI tidak

mencantumkan pedoman pemidanaan, pedomannya bisa langsung mengacu pada KUHP. Lain halnya dengan pidana terhadap korporasi dimana pedoman pemidanaan tetap diperlukan.

4. UU ITE ini mengenal delik aduan. Delik aduan ini tercantum dalam Pasal 27:

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

UU ITE juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang tercantum dalam Pasal 39.

- 1) *Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- 2) *Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Terkait dengan masalah *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, UU ITE mengatur secara khusus dalam Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 45 Ayat 1 UU ITE mengatur masalah *cyber sex*, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang, mengacu pada subjek hukum tindak pidana (STP). Dalam UU ITE, STP meliputi orang perorangan dan badan hukum/korporasi.
2. Unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dirumuskan secara tegas.
3. Tindak pidana (TP) UU ITE ini adalah tindakan membuat, menyediakan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.
4. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif dengan sistem maksimal. Rumusan kumulatif dengan sistem maksimal adalah rumusan/sistem yang dipakai dalam KUHP saat ini. Artinya perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana *cyber sex* dalam UU ITE tidak menyimpang dari ketentuan umum KUHP. Konsekuensinya aturan umum

pidana dalam KUHP dapat langsung diterapkan. UU ITE dalam konteks ini tidak perlu membuat pedoman pidana kecuali jika yang melakukan TP adalah subjek hukum korporasi. Untuk STP korporasi, UU ITE semestinya membuat ketentuan pidana pengganti jika pidana denda tidak dibayar.

3. Sistem Perumusan Sanksi dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Hulsman (Barda Nawawi Arief, 2005: 1) mengatakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah "aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana" (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief (2005: 1), menegaskan bahwa apabila pengertian "pidana" diartikan sebagai suatu "pemberian atau penjatuhan pidana", maka pengertian "sistem pidana" dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- (1) Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas, sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
 - Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- (2) Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana;
 - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana;

Keseluruhan peraturan perundang-undangan baik KUHP maupun undang khusus diluar KUHP pada prinsipnya merupakan bagian/satu kesatuan dari sistem pidana yang terdiri dari "aturan umum" ("*general rules*") dan "aturan khusus" ("*special rules*").

Undang-undang khusus diluar KUHP dalam hal sistem pidana (SP) tampaknya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut ada yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP. Pembuatan ketentuan yang menyimpang atau berbeda secara normatif bukan suatu masalah karena KUHP khususnya Pasal 103 memang memperbolehkan dan memberikan peluang untuk itu.

Perkembangan aturan/ketentuan khusus dari sudut sistem pidana (SP) justru menimbulkan problem yuridis karena banyak undang-undang khusus yang tidak mencantumkan kualifikasi TP sebagai kejahatan atau pelanggaran, membuat ketentuan ancaman pidana minimal khusus tetapi tidak disertai pedoman pidana, ada

undang-undang khusus yang memperluas STP sampai korporasi tetapi tidak disertai ketentuan pertanggungjawaban korporasi.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam UU ITE adalah alternatif kumulatif. Hal ini bisa dilihat dalam perumusannya yang menggunakan kata "...dan/atau". Jenis-jenis saksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang ITE ini ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda. Sistem perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) dalam UU ITE ini adalah :

- Maximum khusus pidana penjara dalam UU ITE paling lama 12 tahun.
- Maximum khusus pidana dendanya, paling sedikit sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhadap pasal KUHP yang dapat diterapkan terhadap *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber pornography*), yaitu : dalam KUHP khususnya Pasal 282, 283, 289, 532, ayat (2) dan Pasal 533 hanya mengenal istilah melanggar kesusilaan. Dalam konteks perkembangan masyarakat, istilah kesusilaan tidak begitu populer, sebaliknya masyarakat menggunakan istilah pornografi dan pornoaksi. Perbuatan pornografi, pornoaksi bisa atau tidak dimasukkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan juga masih terjadi pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena KUHP sendiri tidak pernah memberikan definisi tegas terhadap perbuatan melanggar kesusilaan.
2. Pada perkembangannya, di Indonesia saat ini memang telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*Cybercrime*), yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat ITE, yang mana pada uraian sebelumnya penulis berkesimpulan UU ITE ini tidak dapat digunakan dalam menanggulangi tindak pidana *cyber sex* dan *cyber chil pornography*.

B. Saran

Hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan.
2. Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat

negatifnya serendah mungkin khususnya akibat-akibat yang bertentangan dengan budaya timur, kesusilaan, kepatutan, agama, nilai moral, budi pekerti serta nilai-nilai luhur Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi IV 16-18 September 1991.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, *Antisipasi Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*, makalah disampaikan pada Seminar “Kejahatan Seks melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, FH UNSWAGATI, di Hotel Zamrud Cirebon, 20 Agustus 2005.
- _____, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 2002, “Pengaturan Cyber Crime dengan Hukum Pidana: Beberapa Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Cyber Law, Semarang.
- _____, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Bahan Penataran Nasional HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan ASPEHUPIKI, di Hyatt Hotel, Surabaya, tgl. 14-16 Maret 2005.
- _____, dan Muladi. 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nitibaskara, TB Ronny R, *Problema Yuridis “Cyber Crime”*, Artikel, Dikutip dari <http://www.kompas.com>, diakses tanggal 27 Mei 2007.
- Bungin, M. Burhan, 2005, *Pornomedia Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta, Gramedia.
- Sutadi, Heru, “Cybercrime” Apa yang Bisa Diperbuat. Artikel. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2011.
- Dermawan, Mohammad Kemal, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, “Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime”, *Majalah Media Hukum* Vol I No. 3, tgl 23 Agustus 2003.

- Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Prinsip-Prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime*. Bandung: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Ratna Megawangi. 2006. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Gramedia.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung.
- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni: Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Pres, Jakarta.
- Wreksosuhardjo, Sunarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsfat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Widowaty, Yeni, *Aspek Hukum Tindak Pidana Cyber Crime dalam Penggunaan Teknologi Informasi*. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Wvs.

Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.